CORONA VIRUS DISEASE 2019 - BELANJA TIDAK TERDUGA

2020

PERBUP NO. 9, BD 2020/NO. 9 THN 2020, 12 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu diatur mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2018; PERPU No. 1 Tahun 2020; PP No. 40 Tahun 1991; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; PERPRES No. 16 Tahun 2018; PERPRES No. 17 Tahun 2018; KEPPRES No. 7 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan KEPPRES No. 9 Tahun 2020; KEPPRES No. 11 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERLEMKA PBJ No. 13 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2020; PERDA No. 8 Tahun 2009; PERDA No. 12 Tahun 2016; PERBUP No. 69 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang acuan dan pedoman tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang bersumber dari BTT pada APBD.
- CATATAN:
- Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Maret 2020.